

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**BPK Menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan dan Kinerja
Penanggulangan Kemiskinan di Daerah
pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Daerah Tahun 2021
kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah**

Rabu 18 Mei 2022, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan dan Kinerja Upaya Penanggulangan Kemiskinan serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VI BPK, **Dr. Dori Santosa S.E., M.M., CSFA, CFA** dan diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah **Wiyatno, SP** dan Gubernur Kalimantan Tengah **H. Sugianto Sabran**.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pemeriksaan ditujukan untuk **memberikan opini** atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021. Selain itu BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 terdiri dari Ringkasan Eksekutif, LHP atas Laporan Keuangan (Buku I), LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan (Buku II), dan LHP atas Kinerja (Buku III).

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk itu, BPK memberikan opini "**Wajar Tanpa Pengecualian**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

Pencapaian opini WTP ini adalah yang delapan kalinya bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran OPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tanpa mengurangi keberhasilan dalam pencapaian pelaksanaan anggaran Tahun 2021, dalam sambutannya Dori Santosa menyampaikan bahwa terdapat kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



pengelolaan keuangan daerah yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diantaranya :

1. Penatausahaan keuangan OPD, penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Belanja, dan kualitas informasi keuangan OPD belum memadai;
2. Pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) belum memadai;
3. Terdapat kesalahan klasifikasi penganggaran pada Dinas Pendidikan senilai Rp13,31 Miliar;
4. Standar biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah tidak sesuai ketentuan;
5. Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial belum sepenuhnya tertib;
6. PPK Dinas Pendidikan belum memutuskan kontrak, belum mencairkan Jaminan Pelaksanaan, dan belum mengenakan denda keterlambatan atas paket pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak selesai;
7. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Belum Sesuai Ketentuan senilai Rp2,26 miliar;
8. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Belum Sesuai Ketentuan senilai Rp812,86 juta;
9. Penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya memadai; dan
10. Kebijakan penetapan uang persediaan (UP) OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah TA 2021 tidak sesuai ketentuan.

Selain melaksanakan pemeriksaan LKPD, saat ini BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas upaya penanggulangan kemiskinan di daerah Tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan kebijakan pelaporan hasil pemeriksaan dalam bentuk Long Form Audit Report (LFAR). Pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD yang dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD yang diterbitkan BPK. Dengan tidak mengesampingkan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, BPK masih menemukan permasalahan antara lain:

1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah belum menyusun dan menetapkan RKPD dan RAT Provinsi;
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, sinergis dan terintegrasi antar Satker/OPD yang ada di bawahnya;
3. Hasil pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya tepat sasaran, terlambat disampaikan kepada penerima manfaat, dan belum sepenuhnya diperuntukkan kepada kelompok masyarakat miskin; dan
4. Program penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya mendorong upaya peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan melalui pemanfaatan aset produktif secara kelompok, fasilitasi akses pasar, serta penyediaan teknologi yang murah dan tepat guna.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



BPK menyimpulkan bahwa jika tidak segera dilakukan upaya perbaikan, maka permasalahan tersebut di atas dapat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

“Opini WTP yang sudah diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hendaknya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan penduduknya” jelas Dori Santosa. Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan naiknya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya pengangguran, menurunnya gini ratio, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya angka kemiskinan serta tingkat inflasi yang rendah dan terkendali. Laporan Hasil Pemeriksaan ini akan lebih bernilai apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.

Pada kesempatan ini, BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021. Penyusunan IHPD ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada : (1) Gubernur untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan oleh Kabupaten/Kota; dan (2) DPRD Provinsi untuk mengawasi pelaksanaan APBD.

IHPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 memuat ringkasan dari 171 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan selama Tahun 2021 yang terdiri dari 15 LHP Keuangan, delapan LHP Kinerja, dan 148 LHP PDDT. Dari 148 LHP PDDT diantaranya sebanyak 146 LHP merupakan LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan partai politik dari APBD. Selain itu IHPD juga memuat hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id